

**RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA OPD)**



**KECAMATAN KEBAKKRAMAT
TAHUN 2022**

Alamat : Jln. Raya Solo - Sragen Km 11 Karanganyar Kodepos 57762
Telepon/ Faks (0271) 646925

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
TENTANG RENJA SKPD TAHUN 2022	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Landasan Hukum.....	2
1. 3 Maksud dan Tujuan	4
1. 4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD	6
2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja	6
2. 2 Analisi Kinerja.....	11
2. 3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OP.....	15
2. 4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	27
3. 1 Telaah Kebijakan Nasional Dan Provinsi.....	27
3. 2 Tujuan Dan Sasarana Rencana Kerja PD.....	27
3. 3 Program dan Kegiatan.....	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN.....	37
BAB V PENUTUP	45
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja dan Renstra	7
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan	14
Tabel 2.3	Pemetaan Permasalahan	16
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan	26
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan.....	34
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD.....	37
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022	45

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2022 dapat disusun. Rencana kerja ini secara garis besar mengupas tentang visi misi, nilai, tujuan strategis, sasaran dan target strategis Kecamatan Kebakkramat. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai. Karena secara Institusi Renja ini sebagai wujud pelaksanaan tanggung jawab Camat dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Renja OPD ini merupakan perwujudan dan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang pembuatan dan sistematika Renja OPD dan Dasar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Karanganyar.

Dengan segala keterbatasan perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini. Kami menyadari Rencana Kerja ini masih banyak kekurangannya, kami mengharapkan adanya saran, masukan yang sifatnya membangun guna meningkatkan kinerja Kecamatan Kebakkramat.



Karanganyar, Januari 2022
CAMAT KEBAKKRAMAT


SRIONO BUDI SANTOSO, S.Sos.,M.Si.
Pembina
NIP. 19700721 199003 1 005

LAMPIRAN : XXVII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 76 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Kebakkramat berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) guna menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Kecamatan Kebakkramat agar dapat memberikan kontribusi nyata dan factual terhadap peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar untuk Tahun 2022.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya Renja OPD adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari rencana strategis pembangunan daerah. Renja OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun yang berpedoman pada renstra OPD. Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen renstra OPD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2022 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, melalui : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan serta analisis kinerja.

Berpedoman pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 maka Organisasi Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja. Renja Kecamatan Kebakkramat memuat kebijakan

program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2022 merupakan landasan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat tahun 2022 dilandasi dengan landasan hokum sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2205 tentang Sistem Keolahrgaaan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2008-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayananan Publik;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Naomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor. 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032;
18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
19. Peraturan Bupati Karanganyar No 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang SPM;
21. Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor. 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2022 ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kebakkramat Tahun 2022.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan program kerja pada Kecamatan Kebakkramat pada Tahun 2022.
2. Sebagai standar baku penjabaran tupoksi Kecamatan Kebakkramat sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan;
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan organisasi;
4. Sebagai acuan pimpinan dan semua staf dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, demi terwujudnya optimalisasi tugas-tugas Kecamatan Kebakkramat;

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja proses penyusunan Renja Kecamatan Kebakkramat, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bagian ini akan dijabarkan realisasi, capaian serta analisis dari Renja tahun sebelumnya, faktor-faktor penghambat tercapainya target serta kebijakan-kebijakan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini menjabarkan tentang telaah terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah dan kebijakan dan program pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran dengan jumlah program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini menjabarkan tentang rencana kerja dan pendanaan dalam satu tahun anggaran.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2020 dan Capaian Renstra Kecamatan Kebakkramat Tahun 2018-2023

Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 merupakan implementasi tahun keempat dari Rencana Strategis Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Perumusan Renja Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 didahului dengan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Renja Tahun 2020.

Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2020 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan dokumen perencanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar, sehingga hasil evaluasi target kinerja 2020 dapat menilai efektifitas pelaksanaan dokumen perencanaan yang telah dibuat. Rincian pencapaian kinerja Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Alokasi anggaran sebesar Rp. 205.915.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 204.604.991,00 atau 98,9% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan capaian terbayarkannya jumlah tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik setiap bulannya dengan lancar dan tertib.
- b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan capaian terpenuhinya pembayaran upah jasa tenaga kebersihan dan peralatan kantor.
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan capaian terpenuhinya kegiatan administrasi kesekretariatan berupa pembelian bahan ATK.
- d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan capaian terpenuhinya kegiatan administrasi berupa pembayaran penggandaan dan penjiilidan.
- e. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan capaian tersedianya peralatan rumah tangga.
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan capaian tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar.
- g. Penyediaan bahan logistik kantor, dengan capaian tersedianya kebutuhan logistik kantor berupa gula pasir, teh, kopi, air, dll selama 12 bulan.

- h. Penyediaan makanan dan minuman, dengan capaian tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan rapat dan jamuan tamu selama 12 bulan.
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah, dengan capaian terlaksananya perjalanan rapat koordinasi ke luar daerah berupa laporan perjalanan dinas.
- j. Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan, dengan capaian terpenuhinya pembayaran upah jasa tenaga administrasi kantor pelaksana kegiatan selama setahun.
- k. Penyediaan Logistik dan Perlengkapan Rumah Dinas, dengan capaian tersedianya kebutuhan logistik kantor berupa gula pasir, teh, kopi, air, dll selama 12 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Alokasi anggaran sebesar Rp. 19.640.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.640.000,00 atau 100% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor, dengan capaian tersedianya kebutuhan untuk pemeliharaan peralatan Gedung kantor.
- b. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas /Operasional dengan capaian tercukupinya kebutuhan untuk pemeliharaan Kendaraan Dinas sehingga pelaksanaan tugas kedinasan dapat berjalan dengan lancar.

3. Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 39.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 39.000.000,00 atau 100% dan realisasi fisik 100% yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban, dengan capaian dapat meningkatkan kemampuan Linmas Desa sehingga dapat terwujud keamanan lingkungan Desa.
- b. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan masyarakat dengan capaian terlaksananya pembinaan perangkat desa secara rutin.
- c. Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan, dengan capaian terlaksananya kegiatan musrenbang dan pembinaan PKK Desa / Kecamatan.

Selanjutnya kaitan antara realisasi program dan kegiatan Renja dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Kebakkramat dan Pencapaian Renstra
Kecamatan Kebakkramat s/d Tahun 2021 Kabupaten Karanganyar

NO	URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2020)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN KEBAKKRAMAT									
	KECAMATAN									
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	98,90	100	98,9	99	100,0	297,80	298
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik		89	100	100	100	100		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor		100	100	100	100	100		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis		100	100	100	100	100		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		100	100	100	100	100		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		100	100	100	100	100		
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan alat rumah tangga		100	100	100	100	100		
	Penyediaan Makan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman		100	100	100	100	100		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPd	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi		100	100	95,19	95	100		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		100	100	100	100	100		

	Penyediaan jasa operasional pelaksanaan kegiatan	Tersedianya jasa operasional kantor		100	100	100	100	100		
	Penyediaan logistik dan perlengkapan rumah dinas	Tersedianya Bahan Logistik dan Perlengkapan Rumah Dinas		100	100	100	100	100		
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana prasarana aparatur	100	99,8	100	99,9	100	100	299,71	300
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	TersedianyaPeralatan gedung kantor		98	-	-		100		
	Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas		99	-	-		100		
	Pembangunan/ rehab Pagar kantor	Terpenuhiny Rehab Pagar Kantor		100	-	-		100		
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		100	100	100	100	100		
	Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional		100	100	99,81	100	100		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor		100	-	-		100		
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGANKABUPATEN/KOTA	Terpenuhinya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100				100	200,00	200
	Penyusunan Renstra OPD	Tersusunnya Renstra OPD		100	-	-				
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan keuangan						100,00		
4	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Tercapainya Keamanan Kenyamanan Lingkungan	100	100					100,00	100
	Pembinaan linmas/ Kamtibmas	Pembinaan linmas/ Kamtibmas		100						
	Pembinaan wilayah daerah	Pembinaan wilayah daerah		100						
5	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN		100	94					94,00	94
	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan Sosial Budaya		92						
	Fasilitasi Paskibraka Kecamatan	Fasilitasi Paskibraka Kecamatan		100						

6	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA		100	100					100,00	100
	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa		100						
7	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA		100	100					100,00	100
	Pembinaan Perangkat Desa	Pembinaan Perangkat Desa		100						
	Pembinaan Kegiatan administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Kegiatan administrasi Pemerintahan Desa		100						
	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pemerintahan Desa	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pemerintahan Desa		100						
8	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN		100	100					100,00	100
	Pembinaan PKK Desa	Pembinaan PKK Desa		100						
9	PROGRAM MENGINTENSIFIKASIKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT		100	100					100,00	100
	Survey Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat		100						
10	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH		100	0	100	100	100	100	200,00	200
	Fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban	Fasilitasi dan koordinasi keamanan dan ketentraman		0	100	100	100	100		
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan masyarakat	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan masyarakat		0	100	100	100	100		
	Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan	Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan		0	100	100	100	100		
	Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan Sosial	Fasilitasi dan koordinasi Kesejahteraan Sosial		0				100		
	Fasilitasi dan koordinasi Pelayanan Umum	Fasilitasi dan koordinasi Pelayanan Umum		0				100		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kebakkramat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain :

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
- b. Meningkatnya kemampuan para pengelola keuangan tingkat Kecamatan dan Desa
- c. Meningkatnya pemberdayaan lembaga dan masyarakat desa
- d. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
- e. Meningkatnya tertip pelporan SKPD
- f. Meningkatnya peran PKK dalam kehidupan bermasyarakat
- g. Indek kepuasan masyarakat.

Lingkup analisis kinerja Pelayanan di Kecamatan Jumapolo meliputi Analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampak terhadap masa depan Organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi, Faktor kunci keberhasilan ditentukan oleh :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- a. Tersedianya anggaran untuk pengadaan barang dan jasa;
- b. Terdapatnya budaya gotong royong yang terus dilestarikan dan telah di tetapkan payung hukumnya;
- c. Terdapatnya Organisasi/lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk dengan mendasarkan Perda kabupaten Karanganyar Nomor 26 Tahun 2006;
- d. Terdapatnya Tri Kerukunan Umat beragama;
- e. Terdapatnya Tokoh agama dari masing-masing agama;
- f. Adanya undang-undang yang mengatur dan menjamin stabilitas nasional;
- g. Tingginya Kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban daaerah.

Kelemahan :

- a. Masih banyak penduduk miskin;
- b. Masih ada pandangan bahwa pembangunan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah saja;
- c. Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama;
- d. Masih rendahnya kualitas SDM;
- e. Kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

- a. Terdapatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang kewenangan pengadaan barang dan jasa bagi; OPD;
- b. Adanya kebijakan pemberdayaan masyarakat
- c. Adanya Dana pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat;
- d. Terdapat kehidupan toleransi antar umat beragama;
- e. Terdapat usaha ketahanan bersama masyarakat dan aparat keamanan.

Ancaman :

- a. Rendahnya koordinasi dan sinkronisasi pembangunan masyarakat dalam membangun desa;
- b. Tingkat kompetitif yang rendah antar desa dalam masyarakat desa;
- c. Munculnya paham agama yang radikal dan ekstrim;
- d. Masih minimnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelaksanaan operasional.

Pada pembahasan sub bab ini kami disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kebakkramat dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebakkramat
Kabupaten Karanganyar

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Presentase lembaga kemasyarakatan aktif			90,00	90,00	100,00	100,00	90,00	90,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Presentase wilayah dalam keadaan kondusif			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
3	Presentase wilayah tertib perda			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
4	Presentase sarpras wilayah dalam kedaan baik			100,00	91,00	100,00	100,00	91,00	91,00	100,00	100,00	Tercapai
5	Presentase desa memiliki APBDesa dan RKPDes sesuai ketentuan			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6	Presentase kehadiran musrenbang			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kebakkramat

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul di Wuhan Cina dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian di dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Pemerintah memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di Tahun 2020. Untuk itu pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Oleh karena itu perlu disusunnya RPJMD Baru termasuk perubahan Renstra mengingat pada tahun 2020 semua Program dilakukan pengalihanfokus untuk penanganan Covid-19.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kebakkramat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:
 - a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
 - b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
 - c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
 - c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
 - e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
 - b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
 - c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
 - d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
 - e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
 - b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - c. Masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
 - d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
 - b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
 - d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa;
 - e. Pandemi Covid 19 yang membawa wabah penyakit membuat banyaknya Penderita covid 19 semakin tinggi.
6. Permasalahan Umum di luar tuis

Kurang representatifnya Kantor Kecamatan Kebakkramat

Kedudukan Kantor Kecamatan Kebakkramat yang berada di tengah pusat kota kabupaten seharusnya memiliki ruang tempat kerja yang representatif baik penataan kantor maupun tempat parkir, kondisi saat ini bahwa ruang kerja camat dan staf dirasa kurang memadai. Karena bangunan saat ini yang digunakan masih bangunan lama sehingga dipandang perlu untuk diadakan rehab agar penataan ruang kerja camat dan staf bisa tertata demi kenyamanan dan pelayanan pada masyarakat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebakkramat, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Karanganyar yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Kecamatan Kebakkramat

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
1	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> a. terbatasnya jumlah aparat/ pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing; c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur d. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang; e. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; g. masih kurangnya sistem pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan; h. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan 	<p>Seksi Tata Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, <p>Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. belum optimalnya sosialisasi Perda; b. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. belum optimalnya pembinaan Linmas desa; d. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat <p>Seksi Pemberdayaan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa; b. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; d. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. <p>Seksi Kesejahteraan Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> a. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial; b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. c. masih tingginya tingkat pengangguran; d. kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa. <p>Seksi Pelayanan Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belum Optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat b. Terbatasnya sarana dan Prasarana c. Belum optimalnya Pengelolaan aset di Kecamatan d. Belum Optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan

Tugas Pokok Dan Fungsi :

Struktur organisasi Kecamatan Kebakkramat berdasarkan Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pengoordinasian kegiatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Tata Pemerintahan
- Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kegiatan lingkup internal kecamatan maupun dengan pihak terkait di bidang kesejahteraan rakyat dan pelayanan sosial masyarakat.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanganan kebencanaan serta penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kecamatan.
7. Seksi Pelayanan Umum
- Kepala Seksi Pelayanan umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD

Review rancangan awal RKPD berisikan uraian mengenai proses rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022
Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Targret	Kebutuhan Dana	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec Kebakkramat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	2.767.106.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kec Kebakkramat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	2.126.885.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan		2.221.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan dokumen perencanaan		1.753.729.000	
	Administrasi Umum Perangkat daerah		Cakupan Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		184.691.000	Administrasi Umum Perangkat daerah		Cakupan Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		117.903.000	
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pelayanan sarana prasarana aparatur		63.000.000	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pelayanan sarana prasarana aparatur		10.802.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100.920.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		210.650.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		197.495.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		33.801.000	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Kebakkramat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	7.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Kebakkramat	Indeks Kepuasan Masyarakat	100	3.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum		7.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan		Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum		3.000.000	

3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Kebakkr amat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100	28.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Kebakkr amat	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100	10.200.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat		16.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat		5.100.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat		12.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan masyarakat		5.100.000	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec Kebakkr amat	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100	32.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec Kebakkr amat	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100	197.280.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban		32.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban		197.280.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec Kebakkr amat	Persentase memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100	185.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec Kebakkr amat	Persentase memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100	10.200.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah		Jumlah kegiatan koordinasi kesejahteraan sosial		185.000.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah		Jumlah kegiatan koordinasi kesejahteraan sosial		10.200.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Kebakkr amat	Persentase desa/kelurahan tertib perda	100	16,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Kebakkr amat	Persentase desa/kelurahan tertib perda	100	12.750.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan		16.000.000	Fasilitasi, Rekomendasi Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan		12.750.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang di emban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan Visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan yang good Governence dan akuntabilitas public, oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kebakkramat adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa;
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang di limpahkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kebakkramat

3.2.1 Tujuan

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Kebakkramat merupakan dokumen perencanaan pembangunan urusan penunjang pemerintahan Tahun 2022 . Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat sesuai dengan Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kebakkramat Tahun 2022 adalah

- Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

3.3 Program dan Kegiatan Berisikan Penjelasan Mengenai:

- a. Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Kebakkramat terlepas dari misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih:

Visi:

“Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD Kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai “berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukkan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah

melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasarakatanyang dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, isemua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja

lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat.

- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman. Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan Karanganyar atau Karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan Karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju” mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap;
- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang di lakukan untuk mewujudkan visi yang Ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai Arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat

atau mendiskriminasi antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selangkahnya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selangkahnya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera.

Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang

handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kebakkramat mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu: **Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kebakkramat adalah: **Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik** dengan sasaran: **Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.**

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Kecamatan Kebakkramat dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Kebakkramat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018-2023

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga</p> <p>Tujuan Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya, tata kelola pemerintahan yang baik, berprestasi, dan kesetaraan gender</p> <p>Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</p>	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)	Motivasi serta metode kerja yang sistematis serta peningkatan SDM aparatur.

- a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- Jumlah Program yang diakomodir dalam Renja Kecamatan Kebakkramat Tahun 2022 ada 6 Program dan 20 Kegiatan antara lain sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rencana kegiatan:
 - a. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - d. Penyediaan bahan logistik kantor
 - e. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang undangan
 - g. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
 - i. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan rencana kegiatan :
 - a. Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya
 - b. Pengadaaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
 3. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
 - a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kecamatan
 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan rencana kegiatan :
 - a. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Kapasitas lembaga Kemasyarakatan
 5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan rencana kegiatan :
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan rencana kegiatan :
 - a. Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang 1945, Pelestarian Bhinika Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan rencana kegiatan :
 - a. Fasilitsi Administrasi Tata pemerintahan Desa
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baiuk jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.2 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan perangkat Daerah tahun 2022
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kebakkramat

KODE					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Target 2022 (%)				Pagu Indikatif 2022 (Rp)	Target 2023 (%)	Prakiraan Maju 2023 (Rp)
1					2	3	4	5	6	7	8	9
7					UNSUR KEWILAYAHAN							
7	01				KECAMATAN					2.346.635.500		3.045.400.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					2.126.885.500		2.753.400.000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	1.753.729.000	100%	2.330.000.000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terwujudnya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	100%	1.749.729.000	100%	2.300.000.000
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan keuangan	1 tahun	Dokumen RKA DPA	100%	4.000.000	100%	10.000.000
7	01	01	2.02		Penyusunan Renstra OPD	Tersedianya dokumen Renstra	1 tahun	Dokumen renstra	0	0	100%	10.000.000
7	01	01	2.02		Penyusunan Renja OPD	Tersedianya dokumen Renja	1 tahun	Dokumen renja	0	0	100%	10.000.000

7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah				100%	117.903.000	100%	203.400.000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat kebersihan, bahan pembersih, dan alat tulis kantor	1 tahun	alat kebersihan dan ATK yang memadai	100%	31.131.300	100%	66.000.000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan alat rumah tangga	1 tahun	Alat rumah tangga	100%	2.099.000	100%	5.000.000
7	01	01	2.03	14	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor dan rumah dinas	1 tahun	Kebutuhan logistik	100%	17.083.300	100%	40.000.000
7	01	01	2.05	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Penggandaan dan penjiilidan	100%	14.622.400	100%	26.000.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 tahun	Surat kabar	100%	1.920.000	100%	2.400.000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terwujudnya kelancaran kegiatan rapat dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	1 tahun	Makanan dan minuman rapat serta biaya perjalanan dinas	100%	51.047.300	100%	64.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100%	10.802.500		60.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 tahun	-	0	0		28.000.000
7	01	01	2.07		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Laptop	1 tahun	Laptop	100%	10.802.500		32.000.000

7						Tersedianya ruang tunggu lapangan tenis	1 tahun		0	-	100%	
7					Pengadaan Meubeler	Tersedianya meubeler kantor	1 unit		0	-	100%	
7	01	01	2.07		Pengadaan Alat-alat Studio	tersedianya alat-alat studio kantor	1 tahun	Proyektor	0	0	100%	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 tahun		100%	210.650.000	100%	114.000.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi air dan listrik	1 tahun	Pajak listrik, telepon dan internet	100%	35.400.000	98%	38.000.000
7	01	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	1 tahun	Jasa tenaga harian lepas	100%	173.520.000	98%	76.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	33.801.000	100%	46.000.000
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	1 tahun	Pemeliharaan kendaraan dinas	100%	24.241.000	100%	32.000.000
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 tahun	Pemeliharaan printer, laprop dan komputer	100%	7.830.000	100%	14.000.000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 tahun	Pemeliharaan gedung kantor	100%	1.730.000	100%	-

7	01	01	2.09		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Terpeliharanya Rumah Jabatan	1 tahun	Pemeliharaan rumah dinas	0	0	100%	-
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					3.000.000		10.000.000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan				100%	3.000.000	100%	10.000.000
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Dukumen survey kepuasan masyarakat, Kegiatan Legalisasi	1 tahun	IKM	100%	3.000.000	100%	10.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					10.200.000		34.000.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				100%	5.100.000	100%	20.000.000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	terlaksananya musrenbang	1 tahun	Musrenbang	100%	5.100.000	100%	20.000.000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100%	5.100.000	100%	14.000.000

7	01	03	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kegiatan PKK	1 tahun	PKK Desa	100%	5.100.000	100%	14.000.000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					183.600.000		28.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				100%	183.600.000	100%	28.000.000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya operasional kegiatan sinergitas dengan kepolisian, RI, TNI dan instansi vertikal tingkat kecamatan	1 tahun	Forkopimca	100%	183.600.000	100%	200.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					10.200.000		200.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah				100%	10.200.000	100%	200.000.000
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	Fasilitasi kegiatan daerah dan HUT Kab. Karanganyar, kegiatan FKUB	1 tahun	FKUB	100%	10.200.000	100%	200.000.000

					serta Pemerintahan dan emeliharaan Keutuhan Negawa KEsatuan Republik Indonesia.							
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					12.750.000		20.000.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi an Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				100%	12.750.000	100%	20.000.000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan perangkat desa	1 tahun	Perangkat Desa	100%	12.750.000	100%	20.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KEBAKKRAMAT

Tabel 4.1.

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Unit Organisasi ; Kecamatan Kebakkramat

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Loka s i	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2022 (Rp)	Prakiraan Maju 2023 (Rp)	Keterangan	
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	UNSUR KEWILAYAHAN	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik ketertiban Umum (4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas		SAKIP	69								Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
7 01	KECAMATAN										3.035.106.000	3.045.400.000		
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				Cakupan pelayanan administrasi perkantoran						2.767.106.000	2.753.400.000		

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Persentase pemenuhan dokumen perencanaan	100%				99%	2.221.000.000	2.330.000.000	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kec Kebak kramat			Terwujudnya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	Terbanyarna gaji dan tunjangan	96%	2.197.000.000	2.300.000.000	
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kec Kebak kramat			Tersusunnya laporan keuangan	1 tahun	Dokumen RKA DPA	100%	8.000.000	10.000.000	
7	01	01	2.02		Penyusunan Renstra OPD			Kec Kebak kramat			Tersedianya dokumen Renstra	1 tahun	Dokumen renstra	100%	8.000.000	10.000.000	
7	01	01	2.02		Penyusunan Renja OPD			Kec Kebak kramat			Tersedianya dokumen Renja	1 tahun	Dokumen renja	100%	8.000.000	10.000.000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat daerah				Cakupan Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%				100%	184.691.000	203.400.000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec Kebak kramat			Tersedianya alat kebersihan, bahan pembersih, dan alat tulis kantor	33 item	alat kebersihan dan ATK yang memadai	100%	59.948.000	66.000.000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kec Kebak kramat			Penyediaan alat rumah tangga	6 item	Alat rumah tangga	100%	3.500.000	5.000.000	

7	01	01	2.03	14	Penyediaan Bahan Logistik kantor			Kec Kebak kramat		Tersedian ya Bahan Logistik Kantor dan rumah dinas	1 tahun	Kebut uhan logistik	100%	35.223.000	40.000.000	
7	01	01	2.05	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kec Kebak kramat		Tersedian ya barang cetakan dan penggandaan	2 Item	Pengg andaan dan penjili dan	100%	24.000.000	26.000.000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kec Kebak kramat		Tersedian ya bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan	1 srt kabar	Surat kabar	100%	1.980.000	2.400.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kec Kebak kramat		Terwujud nya kelancara n kegiatan rapat dan konsultasi kedalam dan keluar daerah	1 tahun	Makan an dan minum an rapat serta biaya perjala nan dinas	100%	60.040.000	64.000.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Cakupan Pelayanan sarana prasarana aparatur				98%	63.000.000	60.000.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Kec Kebak kramat		Tersedian ya perle ngka pan gedung kantor	6 unit	Filling Cabin et	98%	15.000.000	28.000.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Komputer			Kec Kebak kramat		Tersedian ya Laptop	2 unit	Laptop	98%	28.000.000	32.000.000	

7								Kec Kebak kramat			Tersedian ya ruang tunggu lapangan tenis	1 paket		98%		-			
7					Pengadaan Meubeler			Kec Kebak kramat			Tersedian ya meubeler kantor	1 unit		98%		-			
7	01	01	2.07		Pengadaan Alat-alat Studio			Kec Kebak kramat			tersediany a alat-alat studio kantor	1 set	Proye ktor	98%	20.000.000		-		
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran				100%		98%	100.920.000	114.000.000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kec Kebak kramat			Terseleng garanya kegiatan penyediaan jasa komunikas i air dan listrik	1 tahun	Pajak listrik, telepo n dan interne t	100%	35.400.000		38.000.000		
7	01	01	2.03	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kec Kebak kramat			Terpenuhi nya pembayar an jasa pelayanan umum kantor	4 orang	Jasa tenaga harian lepas	100%	65.520.000		76.000.000		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Persentase pemenuhan peningkatan sarana dan prasarana aparatur				100%		98%	197.495.000	46.000.000

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kec Kebak kramat			Terpelihar anya Kendaraa n Dinas	1 tahun	Pemeli haraa n kendar aan dinas	98%	27.495.000	32.000.000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kec Kebak kramat			Terpelihar anya peralatan gedung kantor	3 item	Pemeli haraa n printer , laprop dan kompu ter	98%	10.000.000	14.000.000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kec Kebak kramat			Terpelihar anya gedung kantor	1 paket	Pemeli haraa n gedun g kantor	98%	100.000.000	-	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan			Kec Kebak kramat			Terpelihar anya Rumah Jabatan	1 paket	Pemeli haraa n rumah dinas	98%	60.000.000	-	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										7.000.000	10.000.000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan						Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum			100%	7.000.000	10.000.000	

7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kec Kebak kramat	Indeks Kepuasan Masyarakat		Dukumen survey kepuasan masyarak at, Kegiatan Legalisasi	1 keg	IKM	100%	7.000.000	10.000.000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Persentase lembaga kemasyarak at an aktif						28.000.000	34.000.000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaa n masyarakat	100%				100%	16.000.000	20.000.000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan			Kec Kebak kramat	Persentase lembaga kemasyarak at an aktif		terlaksana nya musrenba ng	1 keg	Musre nbang	100%	16.000.000	20.000.000		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaa n masyarakat	100%				100%	12.000.000	14.000.000		
7	01	03	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			PKK Desa se kecam atan	Persentase lembaga kemasyarak at an aktif		Kegiatan PKK	1 keg	PKK Desa	100%	12.000.000	14.000.000		

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Persentase wilayah dalam keadaan kondusif							32.000.000	28.000.000
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				Jumlah kegiatan fasilitasi dan koordinasi Keamanan dan Ketertiban	100%				100%		32.000.000	28.000.000
7	01	04	2.01	01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kec Kebak kramat	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100%	Terpenuhi nya operasion al kegiatan sinergitas dengan kepolisian, RI, TNI dan instansi vertikal tingkat kecamata n	1 tahun	Forko pimca	100%		32.000.000	28.000.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				Persentase memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan							185.000.000	200.000.000
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala daerah				Jumlah kegiatan koordinasi kesejahteraan sosial	100%				98%		185.000.000	200.000.000

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan emeliharaan Keutuhan Negawa KEsatuan Republik Indonesia.			Kec Kebak kramat		100%	Fasilitasi kegiatan daerah dan HUT Kab. Karangany ar, kegiatan FKUB	3 keg	HUT RI, HUT Kabupaten dan FKUB	98%	185.000.000	200.000.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										16.000.000	20.000.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi an Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100%	Jumlah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan			100%	16.000.000	20.000.000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Desa se kecamatan		100%	Pembinaan perangkat desa	2 keg	Perangkat Desa	100%	16.000.000	20.000.000	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat untuk Tahun Anggaran 2022 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh setiap Dinas/Badan/OPD. Rencana Kerja ini dibuat sesuai Rencana strategis (RENSTRA) SKPD Tahun 2018-2023 dan RPJMD Kabupaten Karanganyar yang berkesinambungan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang ada pada Kecamatan Kebakkramat.

Rencana Kerja ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang penting yang dapat menjadi pedoman bagi jajaran organisasi khususnya yang ada dalam lingkup Kecamatan Kebakkramat dalam melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan dan juga merupakan pengukuran kinerja Kecamatan Kebakkramat tahun 2022.

Sebagai upaya dalam mengoptimalkan hasil pelaksanaan kegiatan ini dalam pencapaian kinerja yang sesuai dengan harapan masing-masing bagian organisasi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab langsung atas kegiatan yang telah direncanakan. Salah satu caranya adalah dengan menuangkan rencana kegiatan yang telah dibuat ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan yaitu, Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Selain itu, saat kegiatan dilaksanakan setiap pengelola kegiatan dan penanggung jawab kegiatan wajib melaksanakan pengendalian secara periodik yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Sedangkan kegiatan evaluasi juga bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan di tahun depan.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Kebakkramat untuk tahun 2022 yang dapat kami susun, semoga Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan menjadi tolok ukur kinerja Kecamatan Kebakkramat pada Tahun Anggaran 2022.

BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO